

**DETERMINAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA**

Anas Nur Huda¹, Pandaya²

¹STIE Muhammadiyah Jakarta, anas.kemenkeu@gmail.com

²STIE Muhammadiyah Jakarta, pandaya@sismadigroup.com

ABSTRAK

Penyerapan anggaran merupakan salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian melalui konsumsi pemerintah. Untuk itu penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga turut menjadi penentu pertumbuhan perekonomian tersebut. Selain itu penyerapan anggaran menjadi faktor yang dominan dalam penilaian kinerja birokrasi. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat berkurangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang idle cash. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja terhadap penyerapan anggaran. Kuesioner dibagikan di satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Jakarta V dengan tingkat penyerapan anggaran dibawah 75% pada tahun 2017 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Tingkat KPPN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci: Penyerapan anggaran, perencanaan, pelaksanaan anggaran

ABSTRACT

Budget absorption is one of the drivers of economic growth through government consumption. For this reason, absorption of ministries / agencies' budgets also determines the economic growth. In addition, budget absorption becomes a dominant factor in evaluating bureaucratic performance. Failure to target budget absorption will indeed result in reduced spending benefits. Because the funds that have been allocated, apparently not all of them can be utilized which means there are funds that are idle cash. Even though if the budget allocation is efficient, despite the limited financial resources, the state can still optimize the funding of other strategic activities. This study aims to examine the effect of budget planning and budget execution on budget absorption. The questionnaire was distributed in the work units of state ministries / institutions in the payment area of KPPN Jakarta V with a budget absorption rate below 75% in 2017 according to the KPPN Level Budget Realization Report. The results of this study indicate that budget planning and budget execution have a positive effect on budget absorption..

Keywords: Budget absorption, planning, budget execution

PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran berhubungan dengan kinerja anggaran dan merupakan kemampuan Kementerian/Lembaga dalam menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Penyerapan anggaran menjadi faktor yang dominan dalam penilaian kinerja birokrasi, sehingga muncul

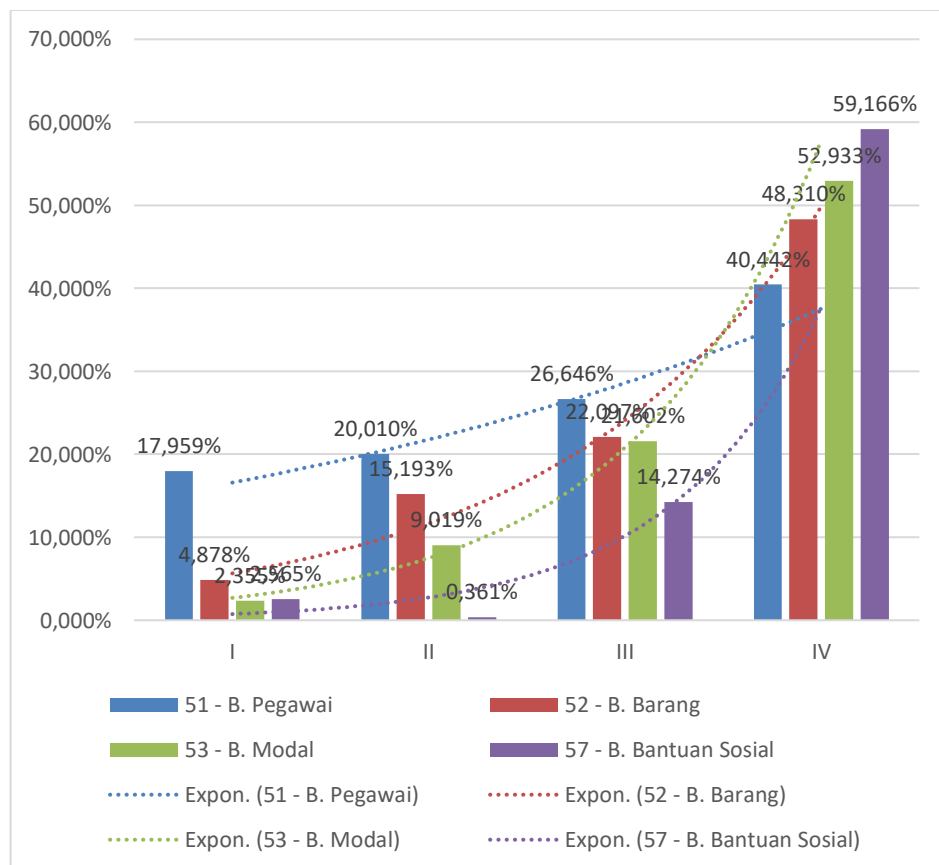
JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

penilaian bahwa anggaran yang didapat yang penting habis, adapun manfaat hasilnya kurang dipertimbangkan. Namun, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran.

Penganggaran berbasis kinerja lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat berkurangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya.

Fakta menunjukkan bahwa masih banyak satuan kerja di pemerintah daerah maupun kementerian negara/lembaga dengan daya serap anggaran rendah terutama pada triwulan (satu) dan triwulan II (dua). Hal ini dapat digambarkan sebagaimana data penyerapan satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jakarta V pada Grafik 1 terkait data realisasi belanja satuan kerja menurut jenis belanja di wilayah pembayaran KPPN Jakarta V per triwulan Tahun 2017. Hal ini mengakibatkan sebagian besar penyerapan anggaran dilakukan pada akhir tahun. Fakta tersebut tentunya menjadi fenomena yang kurang baik.

Gambar 1. Trendline Realisasi Anggaran Satker Kemeterian/Lembaga di Wilayah Bayar KPPN Jakarta V Menurut Jenis Belanja Per Triwulan Tahun 2017



Sumber : Data diolah dari sistem akuntansi pada KPPN Jakarta V

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran. seperti halnya telah disusun langkah-langkah untuk mendorong penyerapan anggaran kebijakan

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

yang oleh Kementerian Keuangan untuk. Langkah-langkah tersebut antara lain: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satuan kerja dalam menyusun rencana penarikan dana (disbursement plan) dan perencanaan pengadaan (procurement plan); (ii) menyempurnakan regulasi – regulasi yang dapat menghambat penyerapan anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran, banyak faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja, seperti diungkapkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sukadi, dalam penulisannya dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja ada Akhir Tahun Anggaran” menyimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran, yaitu faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, serta faktor internal satuan kerja. Herriyanto, dalam penelitiannya dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta”, menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, faktor dokumen pengadaan, dan faktor Ganti Uang Persediaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat begitu pentingnya peran penyerapan anggaran pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat disandingkan dengan fenomena penyerapan anggaran yang kurang baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Judul yang diambil penulis dalam penelitian mengenai penyerapan anggaran adalah Determinan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran

Hansen dan Mowen (2007, 316) mendefinisikan anggaran (budget) sebagai sebuah komponen kunci dalam perencanaan yang merupakan rencana keuangan untuk masa depan yang memuat identifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut Suharsimi (2010:1) anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Anggaran yang digunakan pemerintah dibuat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disahkan melalui Undang-Undang APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 4, APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, dimana adanya kebijakan untuk menyediakan suatu barang/jasa maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori Peacock & Wiseman menjelaskan pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran tersebut. Asumsi dalam teori ini bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak dimana masyarakat dapat menerima besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak, dikarenakan tingkat toleransi masyarakat terhadap pungutan pajak cenderung berpihak pada pungutan pajak dengan jumlah sedikit.

Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Undang-undang tentang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Untuk menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam penyelenggaraan keuangan negara, diperlukan juga asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Perbendaharaan Negara

Sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien, fungsi perbendaharaan semakin penting. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan idle cash untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan Negara adalah beralihnya konsep administrasi keuangan (financial administration) ke manajemen keuangan (financial management). Hal ini memerlukan pembaharuan pada setiap fungsi manajemen, baik pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan. Semua fungsi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk menyusun DIPA sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta plafon anggaran yang telah disediakan. Namun, mekanisme check and balance tetap dilaksanakan sehingga DIPA yang disusun oleh pengguna anggaran tidak serta merta langsung diberlakukan, namun harus dibahas dulu dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperoleh pengesahan.

Hal yang sama berlaku untuk penerimaan, yaitu rencana penerimaan pendapatan juga disiapkan jika pengguna anggaran tersebut mempunyai alokasi anggaran pendapatan.

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Informasi tentang rencana penarikan dana serta rencana penerimaan ini diperlukan oleh Bendahara Umum Negara untuk menyusun anggaran kas.

Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya DIPA. Dalam rangka menjaga agar anggaran dapat dimulai segera pada awal tahun anggaran maka DIPA harus diselesaikan dalam bulan Desember tahun sebelumnya. Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga. Setelah masa transisi pada TA 2005, maka mulai TA 2006, DIPA telah dapat serentak dibagikan pada awal tahun anggaran dimulai.

Pengadaan Barang dan Jasa

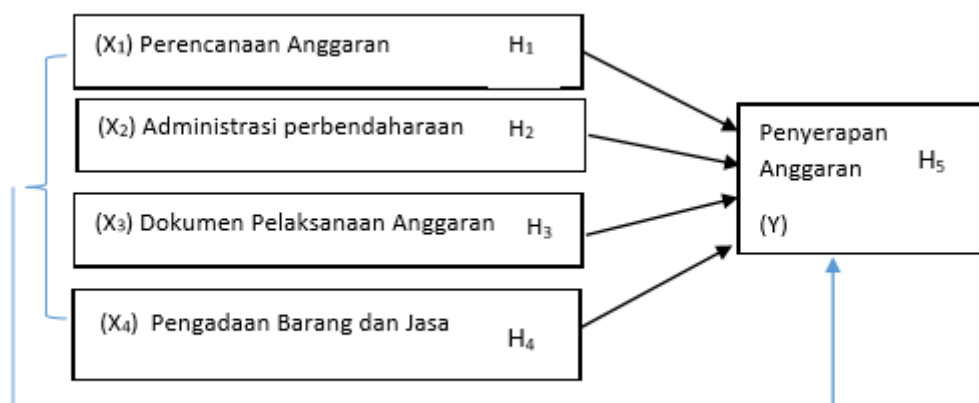
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Adapun prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa antara lain efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Secara umum pengadaan barang dan jasa dengan nilai dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung, adapun nilai di atasnya menggunakan tata cara pelelangan atau dengan ketentuan lain sesuai aturan.

Ketentuan pengadaan langsung yaitu kebutuhan operasional, teknologi sederhana, risiko kecil, dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Sumber: Teori dan Peneliti terdahulu

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, hipotesis yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (H1)

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

2. Administrasi perbendaharaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (H2)
3. Dokumen pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (H3)
4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (H4)
5. Perencanaan anggaran, administrasi perbendaharaan, dokumen pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (H5).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti mengambil tempat satuan kerja kementerian/lembaga lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah para pejabat dan pegawai di bagian anggaran dan pengadaan barang/jasa pada 10 (sepuluh) satuan kerja kementerian negara/lembaga wilayah bayar KPPN Jakarta V dengan penyerapan anggaran dibawah 75% pada tahun 2017. Adapun cara penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Penyerapan Anggaran

α = Konstanta

X1 = Perencanaan Anggaran

X2 = Administrasi Perbendaharaan

X3 = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

X4 = Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

β = Koefisien Regresi

ε = Error (Faktor Pengganggu)

Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat, dan sebaliknya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan T-Statistik dengan T-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi. Jika T-statistik > dari T-tabel atau Signifikansi < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima (Wati, 2018).

HASIL PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pegawai dibagian keuangan, dan pegawai yang pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Jumlah keseluruhan responden berdasarkan Tabel 1 dalam penelitian ini adalah 186 responden.

Tabel 1. Profil Responden

Profil		Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	76	41%
	Perempuan	110	59%

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Usia	21-24	68	37%
	25-34	95	51%
	35-44	10	5%
	45-57	9	5%
	>57	4	2%
	Jabatan/Tugas	KPA	7
PPK		17	9%
PPSPM		9	5%
Bendahara Pengeluaran		9	5%
Pejabat Pengadaan		25	13%
Pegawai dibagian Keuangan.		75	40%
Pegawai pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa		40	22%
Tidak mengisi		4	2%
Tingkat Pendidikan	Pasaca Sarjana	25	13%
	Sarjana/Diploma IV	48	26%
	Diploma	68	37%
	SMA	21	11%
	SMP	20	11%
	Tidak mengisi	4	2%

Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi produk momen Pearson (Pearson product moment). Jika semua item memiliki rhitung > rtabel maka dapat dikatakan bahwa semua item instrumen penelitian valid. Nilai rtabel dicari pada tabel r dengan degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel. Nilai df dalam uji validitas ini adalah jumlah sampel (n) 44-2 = 42. Dengan alpha (α) 0,05 dan uji dua sisi, didapat nilai rtabel = 0,297. Seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel (0,297), yaitu antara 0,424 dan 0,759.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r _{hitung}	Keputusan
Administrasi Perrbendahaaaraan	Admin 1	0,631	Valid
	Admin 2	0,661	Valid
	Admin 3	0,700	Valid
	Admin 4	0,625	Valid
	Admin 5	0,630	Valid
	Admin 6	0,672	Valid
Pengadaan Barang dan Jasa	Pbj1	0,643	Valid
	Pbj2	0,424	Valid
	Pbj3	0,737	Valid
	Pbj4	0,560	Valid
	Pbj5	0,633	Valid
	Pbj6	0,482	Valid
	Pbj7	0,555	Valid
Dokumen Pelaksanaan Anggaran	DPA 1	0,738	Valid
	DPA 2	0,722	Valid
	DPA 3	0,753	Valid

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Penyerapan Anggaran	RA 1	0,759	Valid
	RA 2	0,752	Valid
	RA 3	0,737	Valid
Perencanaan Anggaran	PA 1	0,668	Valid
	PA 2	0,714	Valid
	PA 3	0,616	Valid
	PA 4	0,617	Valid
	PA 5	0,552	Valid
	PA 6	0,604	Valid
	PA 7	0,464	Valid
	PA 8	0,650	Valid
	PA 9	0,577	Valid
	PA 10	0,458	Valid

Sumber: Hasil olahan data SPSS

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach's alpha* masing-masing variabel dibandingkan dengan nilai r_{tabel} *product moment* menggunakan data hasil kuesioner sejumlah 186 responden. Nilai *degree of freedom* (df) adalah 184 (jumlah sampel, dikurangi 2). Dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi, didapat nilai r_{tabel} 0,1439. Jika semua variabel memiliki koefisien reliabilitas *Cronbach's alpha* lebih dari 0,1439 maka dapat dikatakan bahwa semua variabel instrumen penelitian reliabel. Kriteria suatu instrumen juga dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6 sebagaimana yang disampaikan oleh Siregar (2014, 90).

Hasil pengujian reliabilitas dalam menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel melebihi nilai r_{tabel} *product moment* 0,297 dan lebih dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah berhasil melewati uji reliabilitas. Nilai *Cronbach's Alpha* variabel Dokumen pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran menunjukkan nilai yang kecil namun tetap reliabel karena jumlah item pernyataan yang sedikit sebagaimana pendapat Cortina (1993, 103).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keputusan
Perencanaan Anggaran	10	,787	Reliabel
Administrasi Perbendaharaan	6	,707	Reliabel
Dokumen Pelaksanaan Anggaran	3	,579	Reliabel
Pengadaan barang/jasa	7	,664	Reliabel
Penyerapan Anggaran	3	,603	Reliabel

Sumber: Hasil olahan data SPSS

Pengujian Hipotesis

Koefisien Korelasi (r), Koefisien Determinasi (r^2) dan *Adjusted r²*.

Koefisien korelasi (r) menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai kekuatan korelasi memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Kekuatan korelasi dikatakan sangat lemah apabila berkisar 0-0,199, lemah apabila berkisar 0,20-0,399, cukup apabila berkisar 0,40-0,599, kuat apabila berkisar 0,60-0,799, sangat kuat apabila berkisar 0,80-1,00 (Siregar 2014, 337). Koefisien determinasi (r^2) adalah hasil pemangkatan koefisien korelasi (r), yang menjelaskan variasi variabel terikat yang dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam suatu model regresi.

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Tabel 4. Koefisien Korelasi (r), Determinasi (r^2), dan *Adjusted* r^2
Persamaan Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	r	r^2	<i>Adjusted</i> r^2
Perencanaan Anggaran			
Administrasi Perbendaharaan	0,574	0,329	0,314
Dokumen Pelaksanaan Anggaran			
Pengadaan Barang dan Jasa			

Sumber: Hasil olahan data SPSS

Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien korelasi (r), determinasi (r^2), dan *adjusted* r^2 persamaan regresi linear berganda. Nilai r sebesar 0,574 menunjukkan adanya tingkat korelasi cukup kuat sebesar 57,4% antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai *adjusted* r^2 sebesar 0,314 berarti variabel bebas dapat menjelaskan 31,4% variasi variabel terikat, sementara 68,6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

Uji statistik t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat. Ada dua cara melakukan uji t, yaitu dengan perbandingan nilai signifikansi dan dengan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika signifikansi variabel bebas kurang dari 0,05, maka variabel tersebut signifikan. Variabel juga dinyatakan signifikan apabila nilai t_{hitung} variabel bersangkutan lebih besar dari nilai t_{tabel} .

Nilai t_{tabel} ditetapkan dengan taraf signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan *degree of freedom* (df) = n-k, dimana n adalah jumlah sampel penelitian dan k adalah jumlah seluruh variabel (bebas dan terikat). Dengan demikian didapat nilai df = 186-5 = 181, sehingga diperoleh nilai t_{tabel} = 1.973.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t Persamaan Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Nilai Signifikansi		
	t_{hitung}	t_{tabel}	Nilai Signifikansi
Perencanaan Anggaran	2,936	1.973	,004
Administrasi Perbendaharaan	4,387	1.973	,000
Dokumen Pelaksanaan Anggaran	2,051	1.973	,042
Pengadaan Barang dan Jasa	5,473	1.973	,000

Sumber: Hasil olahan data SPSS

Nilai t_{hitung} Perencanaan Anggaran adalah 2,936 dan nilai signifikansi 0,004. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Nilai t_{hitung} Administrasi Perbendaharaan adalah 4,387 dan nilai signifikansinya 0,000. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi perbendaharaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Nilai t_{hitung} Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah 2,051 dan nilai signifikansinya 0,042. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Nilai t_{hitung} pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.13 adalah 5,473 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik f).

Uji statistik f menunjukkan ada tidaknya pengaruh keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji statistik f dilakukan dengan membandingkan nilai f_{hitung} dan f_{tabel} dan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai f_{hitung} melebihi f_{tabel} atau apabila nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Untuk mencari nilai f_{tabel} perlu dicari terlebih dahulu *denominator* (df1) dan *numerator* (df2), dimana $df1 = \text{jumlah total variabel} - 1$ dan $df2 = \text{total sampel} - \text{jumlah keseluruhan variabel}$ (variabel bebas dan terikat). Jumlah total variabel adalah 5 dan jumlah sampel adalah 186, dengan demikian, $df1 = 5 - 1 = 4$ dan $df2 = 186 - 5 = 181$. Dengan nilai signifikansi 0,05 dan uji dua sisi atas nilai df1 dan df2 tersebut, diperoleh nilai f_{tabel} sebesar 2,42.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik f Persamaan Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	f_{hitung}	f_{tabel}	Nilai signifikansi	Batas nilai
Perencanaan Anggaran, Administrasi Perbendaharaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa	22,12	2,42	0,000	0,05

Sumber: Hasil olahan data SPSS

Tabel 6 menunjukkan hasil Uji statistik f antara variabel Perencanaan Anggaran, Administrasi Perbendaharaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran. Nilai f_{hitung} lebih dari f_{tabel} dan signifikansi tidak melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan anggaran, administrasi perbendaharaan, dokumen pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.

PEMBAHASAN

Perencanaan anggaran, administrasi perbendaharaan, dokumen pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang/ jasa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh paling kuat terhadap penyerapan anggaran, diikuti oleh administrasi perbendaharaan pada posisi kedua, kemudian perencanaan anggaran pada posisi ketiga dan dokumen pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh paling kecil terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh positif dan signifikan dari perencanaan anggaran, administrasi perbendaharaan, dokumen pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang/ jasa terhadap penyerapan anggaran dalam penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Hendris Herriyanto (2012, 59). Pengaruh positif dan signifikan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan perencanaan anggaran juga sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo Adi (2013,13). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam penyusunan perencanaan anggaran, tata kelola yang baik dalam administrasi perbendaharaan, dokumen pelaksanaan anggaran yang baik dan tepat waktu penyusunannya, dan proses pengadaan barang dan jasa yang semakin baik akan meningkatkan penyerapan anggaran menjadi lebih optimal.

Pengaruh faktor perencanaan anggaran, administrasi perbendaharaan, dokumen pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh faktor perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Faktor perencanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Jakarta V, maka apabila faktor perencanaan

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

semakin baik maka mempunyai probabilitas/kecenderungan terdapat perubahan peningkatan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t pada variabel perencanaan anggaran dan menghasilkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Nilai mean (rata-rata) total 4,08 juga menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa perencanaan anggaran akan mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja.

Berdasarkan data-data tersebut, faktor-faktor yang terkait dalam perencanaan pada satuan kerja masih tergolong buruk kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan/rendahnya penyerapan anggaran. Hal tersebut disebabkan :

a. Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Jika kegiatan-kegiatan yang diagendakan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kemungkinan besar akan dibatalkan atau ditunda, hal ini akan berakibat tidak terserapnya dana yang sudah dianggarkan. Oleh karena itu, perencanaan kegiatan harus matang dan dipertimbangkan sedemikian rupa, sebanyak mungkin mengumpulkan informasi terkait kebutuhan organisasi.

b. Harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dalam standar biaya (SBU) terlalu rendah/tinggi.

Kebutuhan akan barang dan jasa tentunya tersedia dengan harga pasar, jika standar biaya dibawah harga pasar, maka akan sulit mencari penyedia barang/jasa yang mau menjual dengan harga dibawah harga pasar, kecuali dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan perjanjian tertentu. Permasalahan ini dapat diatasi salah satunya dengan melakukan survei pasar dan memantau perkembangan harga-harga barang/jasa dipasaran sebelum membuat standar biaya. Selain itu harus diperhitungkan angka inflasi dan pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi harga pasar. Namun demikian, penetapan SBU diluar kewenangan satuan kerja, yang menetapkan adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

c. Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung.

Masa penyusunan dan penelaahan anggaran selama ini dianggap kurang bagi satuan kerja dalam merencanakan pencairan dana khususnya untuk awal-awal tahun anggaran. Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya disaat penyusunan usulan kegiatan untuk tahun berikutnya. Secara detail disusun *time table* semua kebutuhan yang diperlukan untuk mengeksekusi kegiatan usulan tersebut. Sehingga pada saat awal tahun, satuan kerja sudah tahu apa yang harus dilaksanakan terkait kegiatan-kegiatan yang masuk dalam anggaran, dan kegiatan dapat segera dilaksanakan tanpa harus menunggu persiapan terlebih dahulu.

d. Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah (tidak sesuai dengan harga pasar).

Hal ini seperti permasalahan pada poin b, jika biaya suatu kegiatan dianggarkan dibawah harga pasar, maka satuan kerja akan sulit untuk mengeksekusi kegiatan tersebut. Jika sampai satuan kerja tidak dapat menemukan penyedia barang/jasa sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, maka kegiatan tersebut pastinya tidak dapat diselenggarakan dan dana yang sudah dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Seharusnya, pada saat membuat rencana kegiatan dan biaya untuk tahun berikutnya, satuan kerja harus mencari tahu harga pasar terkait barang dan jasa yang dibutuhkan, dan perkiraan kenaikan harga karena inflasi dan sebab-sebab lainnya. Sehingga, harga yang dicantumkan dalam rencana kegiatan sudah mencerminkan perkiraan harga pada tahun berikutnya. Hal ini dapat meminimalisasi kurangnya pagu anggaran. Namun apabila pagu anggaran kurang disebabkan karena adanya pemotongan/penghematan, maka satuan kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengurangi frekuensi kegiatan.

e. Adanya penyesuain harga karena adanya kebijakan pemerintah (eskalasi).

Penyesuain harga yang dilakukan pemerintah pada tahun berjalan tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun atau bahkan tahun sebelumnya. Biaya yang direncanakan pastinya tidak sesuai dengan biaya yang akan terjadi. Dikarenakan barang/jasa yang diharapkan mengalami kenaikan

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

harga, sedangkan anggaran tetap, untuk dapat menjalankan kegiatan yang sudah dianggarkan, satuan kerja dapat mengurangi frekuensi atau jumlah barang/jasa yang dibutuhkan.

- f. Tidak menganggarkan biaya administrasi pengadaan.

Satuan kerja dalam menyusun anggaran belanja yang melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sering kali tidak memasukkan semua komponen biaya yang akan timbul. Sebagian besar dalam perencanaan hanya fokus pada harga pokok barang/jasa, padahal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlebih dengan harga yang sangat mahal atau dengan spesifikasi khusus pastinya ada biaya administrasi yang harus dibayar. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dikarenakan perlu adanya revisi atau negoisasi harga. Jika sudah terjadi, maka salah satu cara yang harus ditempuh dengan melakukan revisi anggaran, dengan memasukkan komponen biaya administrasi. Cara lain adalah melakukan negoisasi dengan penyedia, bahwa harga yang sudah dianggarkan sudah termasuk biaya administrasi, sehingga satuan kerja tidak perlu menambah anggaran. Namun sebaiknya pada saat perencanaan kegiatan, dibuatkan *checklist* kebutuhan terkait dengan kegiatan yang diusulkan, hal ini dapat digunakan untuk memeriksa kelengkapan komponen biaya yang diperlukan. Sehingga kemungkinan terjadi adanya komponen biaya yang kurang dapat berkurang.

- g. *Term of reference* (TOR) salah /tidak lengkap.

Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dll. TOR menjadi salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan yang diajukan harus dilampirkan TOR sebagai salah satu acuan perencana anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud. Dengan demikian, TOR bukan sekedar sebagai syarat administratif dari proses pengalokasian anggaran. TOR dapat juga dimanfaatkan berbagai pihak seperti pimpinan yaitu sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, pemeriksa yaitu sebagai referensi dalam melakukan pemeriksaan.

Pada saat penyusunan TOR, pegawai yang dilibatkan sebaiknya yang sudah berpengalaman dengan pekerjaan yang dicantumkan dalam TOR, sehingga pegawai tersebut paham apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dicantumkan ke dalam TOR. Jika kegiatan yang dicantumkan dalam TOR belum pernah dilakukan satuan kerja, maka sebaiknya satuan kerja memanggil konsultan terkait pekerjaan yang ada dalam TOR, hal ini supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan TOR.

Pengaruh administrasi perbendaharaan terhadap penyerapan anggaran.

Tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan terkait pengaruh administrasi perbendaharaan terhadap penyerapan anggaran menghasilkan nilai mean (rata-rata) total 4,1, yang berarti sebagian besar responden setuju bahwa administrasi perbendaharaan mempengaruhi penyerapan anggaran. Dari hasil uji t, variabel administrasi perbendaharaan memiliki nilai signifikansi $<0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ menunjukkan variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jakarta V. Berdasarkan data responden, dari setiap pernyataan (Admin1 s.d Admin 6), sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa setiap item pernyataan tersebut mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Permasalahan-permasalahan yang muncul sesuai dengan item pernyataan diuraikan sebagai berikut:

Salah satu kesalahan dalam perencanaan yaitu salah dalam menentukan akun suatu kegiatan, misal seharusnya belanja modal dimasukkan kedalam belanja barang, tentunya akan menjadi masalah jika tidak direvisi. Untuk mengatasi terjadinya kesalahan dalam menentukan akun, satuan kerja harus teliti dalam memilih akun yang sesuai dengan kegiatan yang akan direncanakan dilakukan pada tahun anggaran bersangkutan. Akun yang akan dipilih umumnya

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

telah disertai penjelasan akun pada Bagan Akun Standar (BAS) sehingga memudahkan dalam mencocokkannya dengan kegiatan tersebut.

Pengetahuan pegawai satuan kerja terkait peraturan-peraturan mekanisme pembayaran sangatlah penting. Kurangnya pengetahuan akan hal tersebut, dapat menghambat penyerapan anggaran satuan kerja, karena satuan kerja akan mencari kegiatan yang sekiranya mekanisme pembayarannya dapat dipahami dengan mudah. Hal ini mengakibatkan kegiatan satuan kerja kurang variatif dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Cara mengatasi hal tersebut antara lain satuan kerja dapat memberikan *training* kepada setiap pegawainya dengan diikutkan pelatihan/diklat terkait mekanisme pembayaran. Cara yang lain adalah mengundang pakarnya untuk dapat mengisi acara sosialisasi mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Jakarta V. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa Perencanaan anggaran, Administrasi perbendaharaan, Dokumen pelaksanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran baik secara parsial maupun simultan.

Faktor perencanaan anggaran sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Jika kegiatan-kegiatan yang diagendakan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kemungkinan besar akan dibatalkan atau ditunda, hal ini akan berakibat tidak terserapnya dana yang sudah dianggarkan. Oleh karena itu, Sebaiknya perencanaan kegiatan harus matang dan dipertimbangkan sedemikian rupa, sebanyak mungkin mengumpulkan informasi terkait kebutuhan organisasi. Menyusun *time table* semua kebutuhan yang diperlukan untuk mengeksekusi usulan kegiatan. Sehingga pada saat awal tahun, satuan kerja sudah tahu apa yang harus dilaksanakan terkait kegiatan-kegiatan yang masuk dalam anggaran, dan kegiatan dapat segera dilaksanakan tanpa harus menunggu persiapan terlebih dahulu.

Faktor administrasi perbendaharaan sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Satuan kerja harus teliti dalam memilih akun yang sesuai dengan kegiatan yang akan direncanakan dilakukan pada tahun anggaran bersangkutan. Pengetahuan pegawai satuan kerja terkait peraturan-peraturan mekanisme pembayaran sangatlah penting. Untuk itu satuan kerja dapat memberikan *training* kepada setiap pegawainya dengan diikutkan pelatihan/diklat terkait mekanisme pembayaran. Cara yang lain adalah mengundang pakarnya untuk dapat mengisi acara sosialisasi mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

Faktor dokumen pelaksanaan anggaran sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Oleh sebab itu, satuan kerja dalam mempersiapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran belanja supaya lebih teliti dan selalu diverivikasi. Misalnya, penyusunan TOR/Kerangka Acuan Kerja lebih teliti, disesuaikan dengan pekerjaan yang dibutuhkan, spesifikasi, waktu pelaksanaan dan lain lain. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) harus sesuai dengan DIPA, sehingga kedepannya tidak perlu ada revisi yang dapat menghambat realisasi pelaksanaan kegiatan. Penyusunan HPS harus memperhatikan standar biaya umum (SBU), supaya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sebaiknya satuan kerja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa perlu lebih teliti dalam memilih penyedia barang/jasa, dari segi kompetensi, pengalaman pekerjaan, kekuatan modal, dan lebih baik lagi mendapatkan informasi terkait persepsi pengguna yang pernah menggunakan jasa penyedia tersebut, sehingga dapat diminimalisasi pekerjaan tidak terselesaikan atau hasil pekerjaan cacat yang mengakibatkan pemutusan kontrak. Selain itu satuan kerja perlu melakukan identifikasi data pegawai secara berkala, sehingga pimpinan dapat mengetahui kompetensi pegawai dan dapat

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Seperti kebutuhan terkait pejabat pengadaan, persyaratan menjadi pejabat pengadaan harus memiliki sertifikasi ahli pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP, sehingga satuan kerja perlu mengirimkan pegawainya untuk ikut sertifikasi ahli pengadaan. Hal ini dapat meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran dapat segera terealisasi.

REFERENSI

- Adi Priatno, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Jurnal. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Anggaran Perusahaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cortina, Jose M. 1993. *What is Coefficient Alpha? An Examination of Theory and Applications*. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 78, No. 1: 98-104.
- Ditjen Perbendaharaan. 2017. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Hal-hal Yang Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran. Jakarta, Jakarta: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen, Don R., dan Maryanne M. Mowen. 2007. *Managerial Accounting. 8th edition*. USA Ohio: Thomson Learning South-Western.
- Herryanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Riduan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Syofian. 2014. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukadi. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. 2018, Jakarta: Ditjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan
- Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2017 di Enam Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dua Provinsi. 2018, Jakarta: Kedepatian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Laporan Realisasi Anggaran Tingkat KPPN menurut Bagian Anggaran, Eselon I, Satker, dan Kewenangan untuk periode yang berakhir tanggal 17 desember 2018, KPPN Jakarta V
- Modul Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan (2008).
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Policy Paper “Outlook Penyerapan Belanja K/L Tahun 2017”. 2017. Jakarta : Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal

Wati, L.N. 2018. Metodologi Penelitian Terapan dengan Aplikasi SPSS, EVIEWS, SmartPLS, dan AMOS. Jakarta: Pustaka Amri.